BAB I  
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Kondisi global dengan adanya perkembangan revolusi industri 4.0 menjadi tantangan besar bagi negara-negara berkembang yang berusaha meningkatkan kesejahteraan dan melindungi masyarakatnya dibidang ekonomi khususnya perdagangan dalam negeri maupun internasional.Semua negara berlomba-lomba meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada bidang penguasaan informasi, teknologi dan keterampilan, karena siapa yang menguasai informasi dan teknologi akan menjadi pemenang dan dapat bersaing dengan negara-negara maju terutama dalam hal perdagangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan kondisi tersebut negara Indonesia melalui pemerintahan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menciptakan iklim ekonomi untuk memberikan kesejahteraan warga negaranya.Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki asset sumber daya manusia yang melimpah, kondisi tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan investor khususnya negara-negara maju untuk berinvestasi, dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara ekonomi.

Presiden Republik Indonesia Jokowidodo memberikan arahan bahwa "Pembentukan [SDM](https://portaljember.pikiran-rakyat.com/tag/SDM) unggul di [masa depan](https://portaljember.pikiran-rakyat.com/tag/masa-depan) tidak bisa lagi berdasarkan ilmu yang dibentuk masa lalu, tapi tren [masa depan](https://portaljember.pikiran-rakyat.com/tag/masa-depan),"arahan [Presiden](https://portaljember.pikiran-rakyat.com/tag/Presiden) [Jokowi](https://portaljember.pikiran-rakyat.com/tag/Jokowi) rapat terbatas pembangunan SDM untuk akselerasi pertumbuhan eknomi di Istana Bogor”. Dengan arahan tersebut pemerintah memiliki peran yang penting di dalam menfasilitasi kegiatan masyarakat dalam bidang perlindungan konsumen, salah satunya didirikannya Unit Metrologi Legal yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 514 di Kabupaten/Kota.

Dalam kontek perlindungan terhadap konsumen, jaminan kebenaran hasil pengukuran pada perdagangan barang dan jasa penting dilakukan. Metrologi Legal berperan sebagai bagian dari pengamanan perdagangan barang dan jasa baik dalam negeri maupun luar negeri. Pengamanan perdagangan dalam negeri, konsumen menghendaki adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran dan kepastian hukum terhadap proses transaksi perdagangan yang menggunakan UTTP, sebagai dasar penetapan kuantitas harga barang dan jasa. Pengamanan perdagangan luar negeri, negara menghendaki adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran terhadap ekspor dan impor barang dan jasa agar negara tidak mengalami kerugian akibat kesalahan atau ketidaksesuaian hasil pengukuran terhadap barang dan jasa yang digunakan oleh masyarakat secara umum. Dari sudut pandang ekonomi, peran Metrologi Legal selain untuk melindungi konsumen, juga dapat mengurangi perselisihan biaya yang ditimbulkan dalam transaksi, dan meningkatkan keuntungan atau nilai tambah dari komoditi ekspor, serta mendukung perdagangan global dalam hal mengurangi *Technical Barrier to Trade* (hambatan teknis) dalam perdagangan.

Proses pengukuran atau penyelenggaraan kegiatan Metrologi Legal diatur melalui Undang-undang No.2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum melalui adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, lambang satuan, metode pengukuran, UTTP dan BDKT.

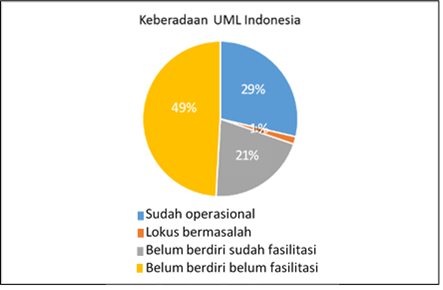
**Tabel 1. 1**

**Ringkasan Pendirian Unit Metrologi Legal (UML)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sudah Operasional  dalam proses penilaian/  SKKPTTU/CTT | Lokus bermasalah | Belum berdiri sudah fasilitasi | Belum berdiri belum fasilitasi | Berdiri | Belum berdiri |
| **146** | **8** | **105** | **250** | **28,4%** | **71,6%** |

Sumber: Direktorat Metrologi tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa keberadaan UML Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia terlihat belum optimal dalam melaksanakan kegiatan kemetrologian, hal tersebut dikarenakan UML yang sudah operasional dan mendapat proses penilaian Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera /Tera Ulang (SKKPTTU) dan Cap Tanda Tera (CTT) baru 28,4% sehingga diperlukan tatanan baru untuk menyelesaikan permasalahan berdirinya UML Kabupaten/Kota. Salah satu permasalahannya persyaratan sumber daya manusia yang berprofesi sebagai Penera.



**Gambar Grafik 1. 1**

**Keberadaan Unit Metrologi Legal Indonesia**

Berdasarkan hasil gambar grafik 1.1 menunjukkan bahwa dari 514 UML di Indonesia yang sudah beroperasional dan proses penilaian mandiri mencapai 29% sebanyak 146 UML. Kabupaten/Kota yang belum memiliki UML disebabkan locus bermasalah mencapai 9% sebanyak 8 UML, sedangkan UML yang belum berdiri dan sudah difasilitasi mencapai 21% sebanyak 105 UML, dan yang belum berdiri belum difasilitasi mencapai 49% sebanyak 250 UML, sehingga total pencapaian yang sudah beroperasional 28,4% dan yang belum beroperasional 71,6%.

Persyaratan pembentukan UML di tingkat Kabupaten/Kota, Kementerian Perdagangan telah merespon dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal yang merupakan pengganti Peraturan Menteri Perdagangan No. 78/M-DAG/PER/11/2016. Peraturan ini telah meyederhanakan syarat penerbitan SKKPTTU sebagai syarat pembentukan UML. Persyaratan jumlah Penera yang semula 4 (empat) orang diubah menjadi hanya 1 (satu) orang.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan pengarahan di Istana Bogor menyatakan bahwa “Indonesia sedang melakukan revolusi besar-besaran untuk sektor vokasional, perombakan harus dimulai dari kurikulum hingga penataan kompetensi teknis. Hal tersebut didukung oleh pengarahan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memberikan pengarahan bahwa “akan menaikan Akademi Metrologi dan Instrumentasi di bawah pengelolaan Kementerian Perdagangan dari progam D-3 menjadi D-4 atau Politeknik.

Berdasarkan informasi dari beberapa daerah Kabupaten/Kota, kesulitan rekrutmen pegawai baru untuk Penera dikarenakan tidak adanya formasi Penera di daerah. Untuk mengantisipasi kekurangan atau ketersediaan SDM Metrologi dapat dilakukan dengan melakukan proses rekrutmen Penera dengan harapan bahwa Penera yang ditempatkan di UML memiliki SDM yang kualitas dan kualifikasi serta kompetensi sesuai yang dibutuhkan oleh instansi, sehingga setiap Penera yang bekerja dalam tugasnya dapat mencapai kinerja yang diharapkan oleh instansi. (referensi Tambunan : Kepala Pusat Penanganan Isu Strategis) .

Berdasarkan data dari Direktorat Metrologi tahun 2020, jumlah total UTTP di seluruh Indonesia sebanyak 124,8 juta, UTTP yang sudah ditera/tera ulang sebanyak 49,1 juta (39,3 %) dan UTTP yang belum di tera ulang sebanyak 75,7 juta (60,7%) sedangkan jumlah Penera di seluruh Indonesia hanya 1200 orang namun sebarannya menumpuk di beberapa daerah saja terutama di pulau Jawa.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pejelasan latar belakang penelitian maka peneliti dapat menemukan permasalahan yang teridentifikasi pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Kesulitan rekrutmen pegawai baru untuk Penera dikarenakan tidak adanya formasi Penera di daerah.
2. Kompetensi teknis Penera yang berlatar belakang Pendidikan Sarjana Teknik dan MIPA di Unit Metrologi Legal sangat terbatas.
3. Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah pada UML Kabupaten/Kota, berakibat Pemerintah Pusat tidak bisa berperan dalam mengatur penempatan Penera di daerah.
4. Kurangnya kepedulian dan pemahaman serta koordinasi Pejabat daerah akan pentingnya penyelenggaraan kegiatan Metrologi Legal di daerah.
5. Masih menganggap kegiatan Metrologi Legal sebagai target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
6. Anggaran yang dimiliki oleh daerah sangat terbatas sehingga untuk pengembangan Metrologi Legal belum berjalan secara optimal.
7. UTTP yang ada di UML Kabupaten/Kota rata-rata lingkup pekerjaannya untuk Penera tingkat Keterampilan, sedangkan Penera yang ada di daerah kebanyakan tingkat Keahlian sehingga adanya ketidaksesuaian tugas Penera.
8. Total jumlah UTTP di seluruh Indonesia sebanyak 124,8 juta, dan yang sudah di tera dan tera ulang sebanyak 49,1 juta (39,3 %) sehingga UTTP yang belum di tera ulang sebanyak 75,7 juta (60,7%) belum memenuhi target pelayanan kemetrologian dalam mewujudkan tertib ukur di segala bidang.
9. Kinerja Penera belum optimal terlihat dari ketidakseimbangan antara jumlah Penera dengan potensi UTTP yang masuk dalam ruang lingkup penilaiaan dan belum merata mengenai sarana dan prasarana, peralatan dan perlengkapan khususnya di UML di pulau Jawa.

**1.3. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah pada penelitian ini dibuat untuk menjaga supaya penelitian ini tidak melebar dan focus terhadap variabel yang digunakan dala penelitian sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini membahas mengenai proses rekrutmen, penempatan dan kompetensi teknis, yang ditengahi oleh *variabel intervening* yaitu kepuasan kerja dan *variabel dependent* yaitu kinerja Penera dengan metode penelitian kuantitatif.

2. Objek pada penelitian ini meliputi variabel proses rekrutmen, penempatan, kompetensi teknis, kepuasan kerja dan kinerja Penera di Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota di pulau Jawa. Konsep variabel mengarah pada penetapan dimensi-dimensi yang digunakan untuk menjelaskan variabel, selanjutnya dikembangkan menjadi indikator-indikator penelitian yang merefleksikan variabel sehingga membentuk sebuah paradigma yang menjadi landasan penelitian, dimana variabel yang tidak diteliti cukup dipresentasikan pada nilai epsilon.

3. Responden penelitian ini meliputi sumber daya manusia yang berprofesi sebagai Penera Keahlian dan Penera Keterampilan.

4. Teknik sampling pada penelitian ini adalah yang mewakili populasi dengan jenis *Cluster Proporsional Stratified Random Sampling*.

**1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian, identifikasi masalah yang terkait dengan penelitian dan pembatasan masalah peneliti dapat merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses rekrutmen, penempatan, kompetensi teknis pada Unit Metrologi Legal di pulau Jawa.

2. Bagaimana kepuasan kerja Penera pada Unit Metrologi Legal di pulau Jawa.

3. Bagaimana kinerja Penera pada Unit Metrologi Legal di pulau Jawa.

4. Seberapa besar pengaruh simultan proses rekruitmen, penempatan, kompetensi teknis terhadap kepuasan kerja Penera pada Unit Metrologi Legal di pulau Jawa.

5. Seberapa besar pengaruh proses rekrutmen terhadap kepuasan kerja Penera pada Unit Metrologi Legal di pulau Jawa.

6. Seberapa besar pengaruh penempatan terhadap kepuasan kerja Penera pada Unit Metrologi Legal di pulau Jawa.

7. Seberapa besar pengaruh kompetensi teknis terhada kepuasan kerja Penera pada Unit Metrologi Legal di pulau Jawa.

8. Seberapa besar pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja Penera pada Unit Metrologi Legal di pulau Jawa.

**1.5. Tujuan Penelitian**

Dengan rumusan masalah tersebut maka peneliti menetapkan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses rekrutmen, penempatan, kompetensi teknis pada Unit Metrologi Legal di pulau Jawa.

2. Untuk mengetahui kepuasan kerja Penera pada Unit Metrologi Legal di pulau Jawa.

3. Untuk mengetahui kinerja Penera pada Unit Metrologi Legal di pulau Jawa.

4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh simultan proses rekruitmen, penempatan, kompetensi teknis terhadap kepuasan kerja Penera pada Unit Metrologi Legal di pulau Jawa.

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh proses rekruitmen terhadap kepuasan kerja Penera pada Unit Metrologi Legal di pulau Jawa.

6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penempatan terhadap kepuasan kerja Penera pada Unit Metrologi Legal di pulau Jawa.

7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi teknis terhadap kepuasan kerja Penera pada Unit Metrologi Legal di pulau Jawa.

8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja Penera pada Unit Metrologi Legal di pulau Jawa.